

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perlindungan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita

a. Pengertian Upaya :

Dapat memberikan advokasi kepada para pemegang kebijakan, agar dapat membantu mengeluarkan kebijakan – kebijakan dan program – program guna penurunan angka kematian ibu. Menambah dan melatih tenaga – tenaga kesehatan agar bisa membantu pengentasan masalah kesehatan khususnya membantu dalam proses persalinan itu.

Memberikan pelatihan kepada dukun tradisional dan mengikutsertakan dukun tradisional pada sistem rujukan dalam proses persalinan ibu melahirkan sehingga proses persalinan ibu dapat ditangani oleh tenaga – tenaga yang ahli dalam bidangnya tersebut (profesional)¹.

1. Penetapan hukum dalam Pasal 5 Menurut Peraturan Daerah No.7 Tahun 2011 :

- a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, membuat banyak masyarakat yang belum mengetahui akan perda yang mengatur tentang perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak balita ini. Dan mengakibatkan lambatnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah

¹ H.A.S, Moenir. 1998. **Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia**. Bumi Aksara, Jakarta. Hal 38

kabupaten atau kota, menjadikan perda tersebut tidak diketahui oleh masyarakat.

- b. Dan kurangnya titik – titik dimana lokasi masih terjadinya kematian ibu dan bayi. Yang mengakibatkan ekskusi secara sosialisasi berdampak pada wilayah – wilayah yang kurang memadai dan peran serta pemerintah daerah baik di kabupaten atau kota tersebut yang secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat².

B. Teori Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kata efektif dapat diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Sedangkan organisasi merupakan kesatuan (susunan) yang terdiri atas bagian-bagian (orang) untuk tujuan tertentu atau bias disebut juga kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian lain dari kata efektifitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuannya artinya kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Istilah efektif berasal dari bahasa inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka panjang dan jangka pendek. Rumah sakit misalnya, dikatakan efektif jika berhasil memenuhi kebutuhan para kliennya dan rumah sakit itu efisien jika ia dapat hal itu dengan biaya yang rendah. Keefektifan sebagai penilaian yang kita buat sehubungan dengan prestasi individu,

² Entjang, Indan. 1993. **Ilmu Kesehatan Masyarakat**. Citra Aditya Bakti, Bandung.

kelompok dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan, makin lebih efektif kita menilai mereka. Pendapat ini menyatakan istilah keefektifan dengan prestasi. Efektivitas aktual dari suatu organisasi tertentu ditentukan oleh tingkat sejauh mana organisasi tersebut meralisasikan tujuannya.

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi ditunjukkan oleh kemampuannya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan sangat ditentukan oleh faktor eksternal maupun internal organisasi. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada diluar organisasi, namun mempunyai pengaruh besar terhadap organisasi. Adapun faktor internal organisasi selain didukung oleh sumberdaya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka yang sangat besar peranannya adalah budaya organisasi yang dianut segenap sumber daya manusia dalam organisasi.

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas.

Efektifitas dalam pelayanan kesehatan, menurut Soerjono Soekanto adalah : “ Pelayanan kesehatan merupakan suatu usaha profesi kesehatan untuk mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan pada setiap orang atau masyarakat yang lebih baik dari keadaan kesehatan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar dapat hidup sejahtera serta produktif

secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan kondisi, situasi dan kemampuan yang nyata dari setiap orang ataupun masyarakat.”³

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Tidak sedikit pendapat yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dipengaruhi struktur dan *culture* baik secara langsung maupun tidak langsung, akan tetapi pada dasarnya teori mengenai efektivitas dipengaruhi struktur dan *culture* yang menekankan adanya perubahan yang berencana dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas.

Efektivitas yang dipengaruhi struktur dan *culture* menekankan pada hal-hal yang dianggap mempengaruhi ketidakstabilan atau ketidakberhasilan dalam mencapai tujuannya.

Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat⁴.

Efektivitas memiliki tiga tingkatan antara lain⁵ :

³ <http://indraachmadi.blogspot.com/2012/04/aspek-hukum-pelayanan-kesehatan.html?m=1/Aspek> hukum pelayanan kesehatan di akses tanggal 4 Maret 2014

⁴ Farich, Achmad. 2009. “Kebijakan Desentralisasi di Bidang Kesehatan: Strategi dan Operasionalnya” diakses pada tanggal 15 Desember 2013 dari <http://www.achmadfarich.com>

⁵ Pohan, Imbalo S. 2007. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi;

2. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya;

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

C. Efektifitas Penegakan Hukum

Pengertian efektifitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa⁶ :

“Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.

Adapun pengertian efektifitas menurut Prasetyo Budi Saksono adalah :

⁶<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas> di akses pada tanggal 3 Oktober 2013

“ Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input “.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegaja dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁷.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang undang saja ;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum⁸ ;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ;

⁷ <http://mbalelonk.wordpress.com/2012/12/11/faktor-efektifitas-penegakan-hukum-di-indonesia> di akses pada tanggal 3 Oktober 2013

⁸Azwar, Azrul. 1996. **Menuju Pelayanan Kesehatan yang Lebih Bermutu**. Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁹.

D. Sistem Pelayanan Kesehatan

Pengertian sistem pelayanan kesehatan adalah tinggi rendahnya angka mortalitas juga mempengaruhi jumlah penduduk serta menjadi tolak ukur tingkat kesehatan masyarakat dan standar kehidupan suatu kelompok masyarakat. Mortalitas adalah hilangnya tanda – tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup¹⁰.

Sistem pelayanan kesehatan adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yg setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam UUD 45. Demikian yang dimaksud dengan **sistem pelayanan kesehatan** yang ada dalam negara kita ini¹¹.

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal penanganan perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak balita menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.7 Tahun 2011, yaitu :¹²

Setiap Ibu berhak :

⁹Putri, Asih Eka. 2002 . “**Implikasi Desentralisasi Sistem Kesehatan Masyarakat dan Paket Agenda Reformasi Kesehatan: Pelajaran Menarik dan Filipina Bagi Indonesia**”, diakses pada tanggal 6 Desember 2013 dari <http://pdfdatabase.com>

¹⁰ Wahid S. Kesehatan sebagai hak asasi manusia. Seminar dan Lokakarya ”Kesehatan dan hak asasi manusia”, Jakarta; 19-20 Maret 2003.

¹¹<http://askep-net.blogspot.com/2012/07/sistem-pelayanan-kesehatan.html> di akses pada tanggal 3 Oktober 2013

¹²*Ibid.* Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di akses 25 Oktober 2013

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang standar selama kehamilan secara cuma – cuma di sarana pelayanan pemerintah bagi masyarakat miskin;
- b. Mendapat pelayanan kesehatan persalinan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan;
- c. Mendapatkan penanganan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas serta rujukan yang adekuat;
- d. Mendapatkan informasi dan pelayanan tentang perawatan kehamilan, persalinan, nifas IMD, ASI eksklusif dan KB yang sesuai dengan kondisi ibu dan berdasarkan pilihan ibu, serta pendidikan kesehatan reproduksi lainnya termasuk skrining HIV/AIDS;
- e. Mendapatkan pelayanan pencegahan anemia dengan menyediakan zat besi saat hamil dan masa nifas;
- f. Mendapatkan pelayanan pencegahan kekurangan vitamin A dengan menyediakan kapsul vitamin A bagi ibu nifas; dan
- g. Mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta saat hamil¹³.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan, yang dimaksud dengan bidan adalah “seseorang dengan persyaratan tertentu telah mengikuti dan

¹³Muninjaya, Gde. 2004. **Manajemen Kesehatan**. Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

menyelesaikan program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku”.¹⁴

Dukun bayi atau paraji adalah seorang anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki ketrampilan menolong persalinan secara tradisional dan memperoleh ketrampilan tersebut secara turun temurun.¹⁵

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar.

Persalinan merupakan hal yang sangat kompleks karena disatu sisi terjadi kebahagiaan menjelang kelahiran anak tetapi di sisi lain terjadi resiko-resiko yang mungkin mengancam keselamatan ibu dan bayi. Oleh karena itu pengawasan ibu hamil dalam persalinan sangat diperlukan. Setiap persalinan mempunyai resiko komplikasi sehingga setiap persalinan dapat dianggap sebagai keadaan darurat dan membutuhkan penanganan yang tepat.¹⁶

¹⁴afrisal47.files.wordpress.com/2013/02/bab-i-4.docx di akses pada tanggal 15 Oktober 2013

¹⁵Ely, Lutfia. 2005. **Upaya Puskesmas dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat**. FIA UNIBRAW, Malang.

¹⁶Pohan, Imbalo S. 2007. **Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan**. Buku Kedokteran EGC, Jakarta.